

# IKHTIYAR

JURNAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEILMUAN SECARA AKTUAL



ISSN : 1412 - 8535

UPT. MATA KULIAH UMUM UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

**DAFTAR ISI**

<i>Pengantar Redaksi</i>	i
<i>Daftar Isi</i>	ii
1. <b>Arsyad Maf'ul</b> Ibm Workshop Pengembangan Materi Ajar Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Sesuai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006 Di SMA Muhammadiyah Belajen Kabupaten Enrekang .....	1 – 11
2. <b>H. Anwar</b> Hubungan Tingkat Pencapaian Kurikulum Terhadap Kemampuan Praktek Konstruksi Baja & Rab/Gambar Siswa SMK Negeri 2 Makassar .....	12 – 21
3. <b>H. Mappeaty Nyorong</b> Gambaran Perilaku Merokok Di Usia Yang Sangat Muda Pada Warga Bone-Bone ....	22 – 29
4. <b>Hj. Hasmyati</b> Hubungan Antara Kekuatan Lengan dan Panjang Lengan dengan Keterampilan Passing Bawah Dalam Permainan Bola Voli Siswa SMA Negeri 1 Sungguminasa Kabupaten Gowa .....	30 – 42
5. <b>Hj. Safiah Jafar</b> Kemampuan Menggunakan Konjungsi Dalam Bahasa Indonesia Siswa Kelas VIII SMP Negeri 3 Watansoppeng .....	43 – 53
6. <b>Hj. Suryani Mursalim</b> Telaah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	54 – 62
7. <b>Jamaluddin</b> Pendidikan dengan Nilai-Nilai dan Budaya Pewarisan Nilai-Nilai dan Budaya .....	63 – 74
8. <b>Khaeruddin</b> Royong Senandung Magis Dalam Siklus Kehidupan Masyarakat Makassar Upaya Perekaman Tradisi Lisan Di Ambang Kepunahan .....	75 – 87
9. <b>Marsuha S.</b> Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Pendekatan Kognitif Konstruktivistik Dalam Proses Belajar Mengajar .....	88 – 92
10. <b>Muhammad Basri</b> Desentralisasi dan Otonomi Pendidikan Dalam Tatakelola Yang Baik ( <i>Good Governance</i> ) (Suatu Tinjauan Administrasi Publik) .....	93 – 105
11. <b>Muhammadong</b> Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia .....	106 – 115
12. <b>Nurhilaliyah</b> Perspektif Pemikiran Politik Islam Kontemporer Di Indonesia .....	116 – 125
13. <b>Sukardi Deppung</b> Pentingnya Guru Memiliki Kemampuan Profesional Untuk Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Yang Mantap .....	126 – 134
14. <b>Zuchri Abdussamad</b> Reformasi Sistem Kepegawaian Menciptakan Kompetensi Aparatur Publik Yang Profesional .....	135 – 140

*Infotaria*

REFORMASI SISTEM KEPEGAWAIAN MENCIPTAKAN KOMPETENSI  
APARATUR PUBLIK YANG PROFESIONAL

Oleh:

Zuchri Abdussamad  
FEB Universitas Negeri Gorontalo

**ABSTRAK**

*Reformasi sistem kepegawaian merupakan salah satu subsistem reformasi birokrasi menghasilkan aparat yang memiliki kompetensi pada bidangnya. Keberhasilan reformasi birokrasi akan sangat ditentukan oleh keberhasilan reformasi kepegawaian. Dalam reformasi kepegawaian maka subsistem yang harus direformasi adalah sistem perekrutan, penggajian, pengukuran kinerja, promosi dan pengawasan terhadap etik dan perilaku PNS. Upaya yang tidak sistematis dan konprehensif, hanya akan menimbulkan persoalan baru dalam birokrasi.*

**Kata kunci:** Reformasi, sistem kepegawaian, kompetensi, dan profesional.

**PENDAHULUAN**

Aparatur birokrasi publik adalah suatu konsekuensi logis dari diterimanya hipotesis negara yang mempunyai misi suci yaitu untuk kesejahteraan rakyatnya. Karena itu negara harus terlibat dalam kehidupan sosial rakyatnya, bahkan jika perlu negara yang memutuskan apa yang terbaik bagi rakyatnya. Untuk itu negara membangun sistem administrasi publik yang bertujuan untuk melayani kepentingan rakyatnya yang disebut dengan istilah birokrasi publik (Darwin, 1998).

Di Indonesia akar permasalahan buruknya pengelolaan sumber daya manusia (kepegawaian) dipengaruhi oleh dua hal penting yakni: 1) persoalan internal sistem kepegawaian dan 2) persoalan eksternal yang mempengaruhi fungsi dan profesionalisme kepegawaian negara. Dan situasi problematis terkait dengan persoalan internal sistem

kepegawaian dapat dianalisis dengan memperhatikan subsistem yang membentuk kepegawaian negara. Sub sistem kepegawaian negara terdiri dari (1) rekrutmen, (2) penggajian, (3) pengukuran kinerja, (4) promosi jabatan dan (5) pengawasan. Kegagalan pemerintah untuk melakukan reformasi terkait dengan subsistem subsistem tersebut telah melahirkan birokrat-birokrat yang dicirikan oleh kerusakan moral dan juga kesenjangan kemampuan untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya.

Terkait dengan persoalan rekrutmen dapat disebutkan beberapa situasi problematis yang dihadapi oleh birokrasi di Indonesia. Proses rekrutmen belum dilakukan secara profesional dan masih terkait dengan hubungan-hubungan kolusi, korupsi dan nepotisme. Rekrutmen pegawai masih dipandang seakan-akan menjadi kebutuhan proyek tahunan dan bukan sebagai kebutuhan akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan peme-